

Tinjauan hukum mengenai kesamaan ip address sebagai indikasi persekongkolan tender studi kasus putusan nomor 10 kppu l 2014 =
Law review on the similarity of ip address as an indication of tender conspiracy case study of kppu verdict no 10 kppu l 2014

Indah Mulia Hanisa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422094&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai kesamaan IP Address sebagai indikasi dalam perkara persekongkolan tender. Dengan diselenggarakannya e-government, kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang atau jasa diwajibkan dilakukan secara elektronik. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi tentunya membawa proses pengadaan barang atau jasa ke dalam babak baru. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru yakni terjadi perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Oleh karenanya muncul pergeseran dan perluasan makna dari alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Namun mengenai kesamaan IP Address sebagai salah satu indikasi persekongkolan tender tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun.

.....This thesis discusses about the similarities of IP Address as an indicator in a tender conspiracy case. In accordance with the implementation of an e-government, Presidential Regulation Number 54 of 2010 regulates that the acquisition of goods or services must be carried out electronically. Further development of technology and informatics has without a doubt brought the process of acquiring goods or services to a new level. Utilization of electronic systems has created a new perspective, which is the paradigm shift from paper based to electronic based. As a result there has also been a shift and wider interpretation of evidence that can be submitted in court. However, IP Address similarities as an indication of tender conspiracy are not regulated in any laws or regulations.